

# ANALISIS KESIAPAN PELAYANAN SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN ELEKTRONIK (E-SKP) DI DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA TIMUR

**Merna Ade Lestari**

S1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, UNESA, (mernaade@gmail.com)

**Dra. Meirinawati, M.AP**

S1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, UNESA (meirinawati@unesa.ac.id)

## Abstrak

Tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih baik mengharuskan pemerintah untuk melakukan reformasi pelayanan publik dengan cara meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan secara menyeluruh baik barang, jasa dan atau pelayanan administratif. Salah satu lembaga pemerintahan yang mencoba menerapkan prinsip *e-government* dalam memberikan pelayanan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, yaitu dengan mulai membangun Sertifikat Kelayakan Pengolahan Elektronik (E-SKP). Sebelum masuk pada tahap pelaksanaan E-SKP, perlu diperhatikan tahapan persiapannya agar tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kesiapan perangkat penyelenggara pelayanan sertifikat kelayakan pengolahan elektronik (E-SKP) di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah 4 lapis struktur dalam Kerangka Arsitektur *E-Government* yang tertuang dalam Inpres No. 3 tahun 2003, yang meliputi: 1) Akses; 2) Portal Pelayanan Publik; 3) Organisasi Pengelolaan dan Pengolahan Informasi; dan 4) Infrastruktur dan Aplikasi Dasar. Narasumber dalam penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling* dengan satu *key informant*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis data interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur sudah cukup siap untuk menyelenggarakan pelayanan Sertifikat Kelayakan Pengolahan Elektronik (E-SKP), hal ini terlihat dari sudah tersedianya empat lapis struktur Kerangka Arsitektur *E-Government* yang tertuang dalam Inpres No. 3 Tahun 2003. Saran yang diberikan yaitu untuk menyediakan fasilitas komputer khusus bagi UPI, dan segera merancang peraturan terkait legalitas E-SKP.

**Kata Kunci:** *E-Government*, Kesiapan *E-Government*

## Abstract

Public demand for better public services require the government to reform public services by improving performance and provide comprehensive services of goods, services or administrative services. One of government agency that tries to apply the principles of e-government in providing services is the Department of Fisheries and Marine of East Java province, to start building a Electronic Certificate of Eligibility Processing (E-SKP). Before entering the implementation phase of the E-SKP, a must is for preparation so that the goals can be reached. The purpose of this study was to describe the readiness of the service providers Electronic Certificate of Eligibility Processing (E-SKP) in the Department of Fisheries and Marine of East Java Province. This type of research used is descriptive with qualitative approach. The focus of this research is 4-layer structure in Architecture Framework for E-Government as stipulated in Presidential Decree No. 3 of 2003, which include: 1) access; 2) Public Services Portal; 3) Organizational and Management Information Processing; and 4) Infrastructure and Basic Application. Resource persons in this study using snowball sampling technique with one key informan. Data collection techniques used were interviews, observation, and documentation. Data were analyzed, uses the interactive data analysis techniques. The results showed that the Department of Fisheries and Marine of East Java Province were quite prepared to carry out the service of Electronic Certificate of Eligibility Processing (E-SKP), it is seen from the already provided his 4-layer structure Architecture Framework of E-Government as stipulated in Presidential Decree No. 3 of 2003. The advice given is to provide specialized computer facilities for UPI, and immediately devise rules regarding the legality of the E-SKP.

**Keywords:** E-Government, Readiness E-Government

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi, informasi dan telekomunikasi dewasa ini memberikan dampak yang sangat besar dalam segala aspek kehidupan masyarakat, salah satunya yaitu

aspek pelayanan publik. Tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih baik mengharuskan pemerintah untuk melakukan reformasi pelayanan publik dengan cara meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan secara menyeluruh baik barang, jasa dan atau

pelayanan administratif. Pemerintah kemudian memanfaatkan perkembangan teknologi, informasi dan telekomunikasi untuk melakukan transformasi dari *traditional government* menjadi *electronic government* (*e-government*).

*E-government* atau pemerintahan elektronik sudah terlebih dahulu diterapkan di negara-negara maju. Demikian halnya di negara berkembang, banyak para pengambil kebijakan yakin bahwa pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan transparan dapat diwujudkan melalui *e-government*. Tujuan utama *e-government* sendiri adalah untuk mendukung *good governance*. Adapun ruang lingkup dari *e-government* ini dalam Indrajit (2006:41) adalah mencakup interaksi antara pemerintah dan masyarakat (*G2C-government to citizens*), pemerintah dan perusahaan bisnis (*G2B-government to business*), hubungan antar pemerintah (*G2G-inter-agency relationship*) dan pemerintah dengan pegawai (*G2E-government to employees*).

Di Indonesia sendiri, inisiatif kearah *e-Government* telah diperkenalkan sejak tahun 2001 melalui Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media, dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung *good governance* dan mempercepat proses demokrasi. Kemudian keluarnya Instruksi Presiden RI No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* merupakan langkah serius pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di dalam proses pemerintahan dan menciptakan pemerintahan Indonesia berbasis elektronik. Hal tersebut menyebabkan setiap pemerintahan daerah berlomba-lomba menyusun Rencana Strategis Pengembangan *E-Government* di lingkungannya masing-masing mulai dari penyusunan kebijakan, peraturan dan perundang-undangan, standarisasi, panduan yang diperlukan, sesuai dengan kewenangan dan kompetensi yang dimiliki. Rencana Strategis itu dengan jelas menjabarkan lingkup dan sasaran pengembangan *e-government* yang ingin dicapai, kondisi yang dimiliki saat ini, strategi dan tahapan pencapaian sasaran yang ditentukan, kebutuhan dan rencana pengembangan sumber daya manusia, serta rencana investasi yang diperlukan.

Salah satu lembaga pemerintahan yang mencoba menerapkan prinsip *e-government* dalam memberikan pelayanan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur. Dalam bidang perikanan dan kelautan Jawa Timur memiliki potensi sektor kelautan dan perikanan yang cukup besar ([http:// seafoodservicecenter.com](http://seafoodservicecenter.com)). Menurut data yang diolah dari Badan Pusat Statistik bidang Perikanan, diketahui bahwa pada tahun 2014

Provinsi Jawa Timur memiliki hasil perikanan budidaya sejumlah 1,043 juta ton maupun perikanan tangkap sejumlah 399 ribu ton yang cukup bersaing dengan provinsi-provinsi lainnya. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 disebutkan bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perikanan dan kelautan. Salah satu fungsi yang diselenggarakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perikanan dan kelautan, dalam hal ini termasuk pelayanan dalam bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Sedangkan yang memiliki kewenangan melaksanakan tugas di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan tersebut adalah Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan khususnya seksi Bina Mutu.

Dalam pasal 14 ayat 1 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 94 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Sedangkan Seksi Bina Mutu mempunyai tugas salah satunya yaitu melaksanakan *monitoring* terhadap pemakaian obat, bahan kimia dan bahan biologi pada unit pengolahan ikan. Perdirjen P2HP Nomor Per.09/DJ-P2HP/2010 mendefinisikan unit pengolahan ikan, atau yang disingkat menjadi UPI, adalah tempat yang digunakan untuk mengolah ikan baik yang dimiliki oleh perorangan, kelompok maupun badan usaha. Sedangkan pengolahan ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia.

*Monitoring* pada Unit Pengolahan Ikan (UPI) dilakukan mulai dari tempat/unit yang melakukan pengolahan, proses pengemasan, sampai pada proses penyimpanan. Hal ini dilakukan agar produk yang dihasilkan mempunyai penampilan dan mutu yang baik sehingga aman dikonsumsi manusia. Selanjutnya bagi UPI yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan perlu diterbitkan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP). Sesuai dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Nomor Per.09/DJ-P2HP/2010 tentang Persyaratan, Tata Cara Penerbitan, Bentuk, dan Format Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) menyebutkan bahwa Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) adalah sertifikat yang diberikan kepada UPI yang telah menerapkan Cara Pengolahan yang Baik (*Good Manufacturing Practices/GMP*) dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Sanitasi Standar (*Standard Sanitation Operating Procedure/SSOP*).

Untuk semakin meningkatkan pelayanan kepada UPI, maka Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur khususnya bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan seksi Bina Mutu kemudian mulai menerapkan *electronic government* yaitu dengan mengembangkan Sertifikat Kelayakan Pengolahan Elektronik (E-SKP). E-SKP adalah sistem aplikasi *online* penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan secara elektronik yang dapat diakses dimana saja oleh UPI yang akan mengajukan permohonan tanpa perlu datang ke kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur. Aplikasi E-SKP ini akan di-*launching* pada Mei 2016 didahului dengan adanya sosialisasi penggunaan aplikasi tersebut.

Sebelum masuk pada tahap pelaksanaan E-SKP, perlu diperhatikan tahapan persiapan penyelenggaraan pelayanan E-SKP agar tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana. Kesiapan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dalam menyelenggarakan pelayanan E-SKP dianalisis menggunakan 4 lapis struktur dalam Kerangka Arsitektur *E-Government* yang tertuang dalam Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* dan didukung dengan komponen yang harus diperhatikan dalam penerapan *e-government* menurut Indrajit (2005:80). 4 lapis struktur Kerangka Arsitektur *E-Government* tersebut terdiri dari akses yang berkaitan dengan komponen *connectivity* yang menyangkut ketersediaan infrastruktur komunikasi dan teknologi informasi; portal pelayanan publik; organisasi pengelolaan dan pengolahan informasi yang berkaitan dengan komponen *competency building* yang menyangkut pengadaan SDM, pelatihan dan pengembangan kompetensi; serta infrastruktur dan aplikasi dasar yang berkaitan dengan komponen *content development* yang menyangkut pengembangan aplikasi, penggunaan bahasa pemrograman, spesifikasi sistem basis data dan kesepakatan *interface*.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena bertujuan untuk mengetahui gambaran sejauh mana kesiapan pelayanan Sertifikat Kelayakan Pengolahan Elektronik (E-SKP) di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini dikhususkan dilakukan pada Seksi Bina Mutu karena merupakan seksi yang mempunyai wewenang dalam memberikan pelayanan penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan.

Dalam menetapkan informan menggunakan teknik *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan bantuan *key-informan*, dan dari *key informan* inilah akan berkembang sesuai petunjuknya. *Key-informan* dalam penelitian ini yaitu

salah satu pegawai seksi Bina Mutu yang ditugaskan untuk menyusun kerangka arsitektur pengembangan *e-government*, kemudian untuk selanjutnya memberikan petunjuk siapa informan yang berkompeten untuk memberikan data, baik dari kalangan pegawai instansi terkait maupun dari perwakilan UPI selaku pemohon penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan (SKP). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur pasal 2. Dijelaskan pula dalam pasal 33 ayat (1), bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan, yang merupakan Dinas Daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perikanan dan kelautan. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur beralamat di Jl. Ahmad Yani 152B Surabaya. Email: [ikanjatim@yahoo.com](mailto:ikanjatim@yahoo.com). Nomor Telp.: (031) 8292326, Fax: (031) 8292326. Situs Web resmi: <http://diskanlut.jatimprov.go.id/>

Sertifikat Kelayakan Pengolahan Elektronik atau dapat disingkat E-SKP adalah sebuah model aplikasi *online* penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan berbasis web/jaringan. Dalam Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/030/116.05/2016 tentang Sosialisasi Aplikasi E-SKP Bagi UPI (Unit Pengolahan Ikan) Skala Besar dijelaskan bahwa E-SKP dibuat dalam rangka meningkatkan pelayanan agar lebih cepat, tepat, efisien dan efektif melalui sistem elektronik.

Dari hasil penelitian selanjutnya hasil tersebut akan dibahas dengan menggunakan teori Kerangka Arsitektur *E-Government* yang tertuang dalam Inpres No. 3 Tahun 2003 dan didukung dengan 6 komponen penting yang harus diperhatikan dalam penerapan *e-government* oleh Indrajit (2005:80) untuk mengetahui gambaran sejauh mana kesiapan penyelenggaraan pelayanan E-SKP. Berikut merupakan uraian indikator-indikator tersebut dalam pembahasan:

### a. Akses

Akses merupakan pondasi awal penyelenggaraan *e-government*. Akses berkaitan dengan komponen *Connectivity* dalam Indrajit (2005:80), yaitu ketersediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi, jaringan internet dan media komunikasi lainnya yang dapat digunakan



sebagai alat untuk mengakses portal pelayanan publik. Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengakses informasi, mulai dari teknologi yang paling sederhana (loket, telepon, pos) sampai yang paling mutakhir (faksimili, komputer, telepon seluler, televisi interaktif). Berkaitan dengan akan diselenggarakan pelayanan E-SKP, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur sudah menyediakan infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan tersebut berupa jaringan fisik informasi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat elektronik dan komputer, jaringan telekomunikasi dan media komunikasi seperti telepon dan fax, serta jaringan internet.

Setiap komputer di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur sudah terhubung satu sama lain menggunakan jaringan LAN atau *Local Area Network* namun hanya terhubung di setiap ruangan saja tidak secara menyeluruh. Dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 55/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah, dijelaskan bahwa LAN merupakan jaringan komputer yang saling terhubung dalam satu gedung atau satu kompleks perkantoran yang berdekatan, yang digunakan untuk komunikasi data dalam suatu area kerja tertentu. Peralatan minimum yang dibutuhkan untuk membangun LAN adalah *server*, *workstation* dan perangkat lunaknya, serta *hub* dan jalur komunikasi berupa kabel atau perangkat nirkabel. Jaringan LAN pada umumnya digunakan untuk keperluan e-mail, mengakses basis data serta pertukaran file, data dan informasi.

Meski jaringan LAN hanya menghubungkan setiap komputer dalam satu ruangan saja namun hal ini tidak menghambat penyelenggaraan pelayanan E-SKP. Karena aplikasi E-SKP merupakan aplikasi berbasis web yang dapat diakses dengan menggunakan internet, sehingga tidak memerlukan LAN. Selain itu, yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengolah Sertifikat Kelayakan Pengolahan hanya pegawai dan Kepala Seksi Bina Mutu. Sehingga yang dapat mengakses dan menjadi administrator dari aplikasi E-SKP hanya pegawai sekaligus Kepala Seksi Bina Mutu. Maka kegiatan *data sharing* ke ruangan lain atau bagian lain di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur tidak diperlukan.

Selanjutnya untuk jaringan internet telah tersedia koneksi internet *by Astinet* yang dapat memudahkan pegawai untuk mengakses portal pelayanan publik ataupun aplikasi berbasis web E-SKP. Selain itu untuk semakin meningkatkan pelayanan publik nantinya akan disediakan 1 unit perangkat komputer yang dapat digunakan oleh UPI yang akan mengakses situs web E-SKP di Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi

Jawa Timur. Namun hal ini belum terealisasi karena terdapat kendala pada tempat untuk meletakkan perangkat komputer khusus UPI tersebut.

Terkait dengan kesiapan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur khususnya Seksi Bina Mutu Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dalam menyelenggarakan pelayanan E-SKP, dari indikator Akses yang menyangkut jaringan telekomunikasi, jaringan internet dan media komunikasi sudah cukup siap. Hanya terdapat kendala pada tempat untuk menyediakan perangkat komputer khusus bagi UPI yang akan mengakses E-SKP di Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur.

#### **b. Portal Pelayanan Publik**

Sejak tahun 2012 Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur sudah memiliki situs web resmi sebagai portal pelayanan publik, namun situs web tersebut tidak aktif atau tidak update sampai 2015. Pada Juni 2015 turun SK Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/10526/116.01/KPTS/2015 tentang Pembentukan Tim Pengelola Website Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, surat keputusan tersebut kemudian yang mendasari dimulainya lagi pengelolaan situs web Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur yang sebelumnya tidak aktif.

Situs web resmi ini dikelola oleh Sekretariat Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur. Situs web yang beralamat di <http://diskanlut.jatimprov.go.id> ini menyediakan informasi terkait kondisi perikanan dan kelautan di Jawa Timur. Selain itu situs web resmi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur juga sudah terintegrasi dengan beberapa situs web lainnya yang berkaitan dengan perikanan dan kelautan, seperti berikut:

- 1) Situs web SOLFEC (*Smart OnLine Fisheries Export Certificate*)
- 2) Situs web UPT Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (PPMHP) Kota Surabaya.
- 3) Situs web *Seafood Service Center*, merupakan sebuah situs web yang memberikan informasi terkait Harga Pasar Perikanan, Persyaratan Akses Pasar Perikanan dan Bimbingan Ekspor.
- 4) Situs web *Fish Storage*, merupakan situs web yang berisi perkembangan harga pasar nasional.
- 5) Situs web Bidang Perikanan Tangkap.
- 6) Situs web LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Provinsi Jawa Timur.

Sedangkan untuk aplikasi berbasis situs web E-SKP belum terintegrasi dengan situs web Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur. Namun nantinya akan segera terintegrasi sejalan dengan penyelenggaraan pelayanan E-SKP. Dengan terintegrasinya situs web E-SKP dengan situs web resmi

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat membantu bagi setiap UPI yang belum mengetahui informasi mengenai alamat situs web E-SKP.

Dalam menyediakan layanan informasi publik kepada masyarakat, situs web ini dapat diakses 24 jam tanpa dibatasi waktu. Namun untuk layanan Diskusi yang diperuntukkan bagi pengguna untuk berinteraksi langsung dengan Admin situs web resmi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur ini hanya dapat digunakan pada saat jam kerja saja. Melalui situs web resmi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, masyarakat dapat mengetahui informasi yang *up-to-date* terkait dengan perikanan dan kelautan di Jawa Timur bahkan di Indonesia.

### c. Organisasi Pengelolaan dan Pengolahan Informasi

Yang dimaksud dengan organisasi pengelolaan dan pengolahan informasi adalah orang-orang yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan. Maka dalam penyelenggaraan pelayanan E-SKP ini, yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan E-SKP adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur. Sedangkan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan khususnya Seksi Bina Mutu diberi tanggung jawab sebagai organisasi pengelolaan dan pengolahan informasi atau yang berperan sebagai *back-office* dari aplikasi E-SKP. Para pegawai seksi Bina Mutu yang juga sebagai Pembina Mutu, menjadi Administrator dalam aplikasi E-SKP.

Terdapat beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh para administrator dalam aplikasi E-SKP, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Memahami operasional komputer
- 2) Memahami jaringan komputer dan jaringan internet
- 3) Memahami dan mengerti alur proses sertifikasi SKP manual
- 4) Memahami dan mengerti logika data E-SKP
- 5) Memahami *flow chart* proses E-SKP

Namun Dinas Perikanan dan Kelautan tidak menyiapkan pendidikan dan pelatihan khusus bagi pegawainya yang mendapat tugas sebagai organisasi pengolahan dan pengelolaan informasi terkait E-SKP, dalam hal ini yang menjadi administrator yaitu pegawai seksi Bina Mutu. Hal ini dikarenakan pegawai dirasa sudah terbiasa mengoperasikan komputer dan untuk mengoperasikan situs web dapat dipelajari secara otodidak.

### d. Infrastruktur dan Aplikasi Dasar

Pengembangan e-government di suatu lembaga pemerintah, dilandasi oleh 4 (empat) infrastruktur utama, meliputi :

- a) Suprastruktur *e-government* yang memuat peraturan di tingkat lembaga yang terkait dengan

pengembangan *e-Government (regulation)*. Termasuk juga didalamnya yaitu komponen *Cyber Law* (Indrajit, 2005:80) yang menyangkut keberadaan kerangka, produk dan perangkat hukum.

- b) Infrastruktur jaringan yang memuat antara lain protokol komunikasi, topologi, teknologi dan keamanan.
- c) Infrastruktur informasi yang memuat antara lain struktur data, format data, metoda berbagi data (*data sharing*), dan sistem pengamanannya.
- d) Infrastruktur aplikasi yang memuat antara lain aplikasi layanan publik, aplikasi antar muka (*interface*), dan aplikasi *back office*.

Produk hukum berupa undang-undang yang mengatur legalitas E-SKP di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur masih belum ada dikarenakan aplikasi E-SKP masih baru. Sedangkan yang menjadi dasar dari penyelenggaraan pelayanan E-SKP ini hanya berbentuk keputusan dari Kepala Dinas tentang sosialisasi E-SKP yaitu Keputusan Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/030/116.05/2016 tentang Sosialisasi Aplikasi E-SKP Bagi UPI (Unit Pengolahan Ikan) Skala Besar. Nantinya sejalan dengan diselenggarakannya pelayanan E-SKP akan dibuatkan suatu produk hukum yang mengatur legalitas E-SKP.

Penyelenggaraan pelayanan E-SKP ini didukung dengan infrastruktur baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Perangkat keras yang disediakan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur untuk mendukung penyelenggaraan E-SKP ini khususnya di ruangan Seksi Bina Mutu Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berupa 7 unit laptop, 9 unit printer dan 4 unit modem. Perangkat keras tersebut disediakan masing-masing 1 unit untuk setiap pegawai seksi Bina Mutu selaku Pembina Mutu sekaligus Administrator dalam aplikasi E-SKP.

Sedangkan perangkat lunak dari E-SKP ini yaitu berupa suatu model aplikasi berbasis web. Terkait dengan pembuatan aplikasi, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur tidak membangun sistem aplikasi sendiri melainkan menggunakan jasa CV. Refresh Media Technology yang merupakan perusahaan pengembang situs web atau *website developer*. Perusahaan tersebut yang kemudian mengembangkan suatu aplikasi yang berfungsi untuk mempermudah UPI dalam melakukan permohonan SKP, yang selanjutnya oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur menamakannya Sertifikat Kelayakan Pengolahan Elektronik atau E-SKP. Aplikasi E-SKP adalah aplikasi *online* berbasis web atau jaringan. Sehingga UPI dapat mengakses aplikasi E-SKP dimana saja dan kapan saja.

Aplikasi E-SKP memakai bahasa pemrograman PHP dengan *MySQL* sebagai *database*. PHP atau *Personal Home Page* adalah bahasa pemrograman web atau *scripting language* yang didesain untuk aplikasi berbasis web, seperti halnya E-SKP. Penggunaan PHP memungkinkan web dapat dibuat dinamis sehingga *maintenance* situs web menjadi lebih mudah dan efisien. Sedangkan *MySQL* merupakan *database* yang *opensource* atau gratis, sehingga pengelolaannya lebih mudah. *MySQL* juga merupakan *database* yang sangat kuat dan cukup stabil untuk digunakan sebagai media penyimpanan data.

Selanjutnya karena aplikasi E-SKP memuat data-data pribadi masing-masing UPI sebagai pengguna jasa, maka digunakan sistem anti *SQL Injection* sebagai sistem keamanan web. Selain itu di halaman depan sebelum masuk ke aplikasi E-SKP baik administrator maupun UPI harus melakukan proses *login* yang mewajibkan pengguna untuk mengisi *username* dan *password*. UPI diberikan wewenang secara penuh untuk mengganti *password* dari profilnya di aplikasi E-SKP ini sebagai bentuk pengamanan terhadap data-data pribadi UPI dalam aplikasi E-SKP.

Sedangkan untuk *server* aplikasi E-SKP masih terdapat kendala karena *server* yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur belum cukup siap untuk digunakan sebagai *server* E-SKP. Terlebih lagi nanti pada awal Mei 2016 diadakan sosialisasi terkait E-SKP yang mengundang semua UPI di Jawa Timur, yang tentunya semua UPI tersebut akan mengakses aplikasi E-SKP secara bersama-sama. Untuk mengatasi kendala *server* tersebut, pihak Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dan pihak CV. Refresh Media Technology sepakat untuk menyewa *server* lokal di luar *server* dari Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur.

Untuk penanganan jika terjadi *trouble* pada aplikasi E-SKP, CV. Refresh Media Technology selaku pembuat aplikasi berbasis web E-SKP memberikan pendampingan selama 6 bulan pada seksi Bina Mutu selaku Administrator dalam aplikasi E-SKP. Diluar waktu tersebut, penanganan saat terjadi *trouble* akan di-*maintenance* oleh CV. Refresh Media Technology namun dengan biaya perawatan tambahan.

Dalam E-SKP terdapat 2 macam aplikasi yaitu yang diperuntukkan bagi administrator yang berupa *back-office* dan *interface* yang disediakan untuk UPI. *Back office* lebih banyak menangani masalah administrasi yang berkaitan erat dengan layanan publik. Sedangkan aplikasi *interface* yang disediakan untuk UPI sebagai pengguna layanan adalah aplikasi *e-government* yang secara langsung menyediakan layanan untuk publik. Sehingga

antar pegawai dengan UPI dapat berinteraksi seperti pada loket layanan.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis yang dilakukan, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur khususnya Seksi Bina Mutu Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sudah cukup siap untuk menyelenggarakan pelayanan Sertifikat Kelayakan Pengolahan Elektronik (E-SKP).

Ditinjau dari aspek Akses, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur sudah cukup siap. Hal tersebut karena di Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur sudah tersedia jaringan LAN yang menghubungkan setiap komputer di setiap ruangan di Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur. Selain itu juga sudah tersedia jaringan internet dengan menggunakan *wifi* yang dapat digunakan untuk mengakses aplikasi berbasis web E-SKP. Media komunikasi berupa telepon dan fax juga sudah tersedia. Hanya saja akses yang disediakan tersebut hanya diperuntukkan bagi pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur.

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur sudah memiliki situs web resmi sebagai portal pelayanan publik. Situs web resmi ini sudah terintegrasi dengan situs web instansi lain yang terkait dengan perikanan dan kelautan serta dengan situs web setiap bagian di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur.

Ditinjau dari aspek Organisasi Pengelolaan dan Pengolahan Informasi, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur sudah memberi tanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan untuk mengelola dan mengolah informasi terkait E-SKP. Kepala Seksi Bina Mutu dan pegawai Bina Mutu selaku Pembina Mutu diberi tanggung jawab untuk menjadi administrator dalam aplikasi berbasis web E-SKP. Kompetensi yang dibutuhkan oleh setiap pegawai juga sudah dimiliki, meskipun tidak disediakan pendidikan dan pelatihan khusus untuk mengoperasikan aplikasi E-SKP.

Selanjutnya ditinjau dari aspek Infrastruktur dan Aplikasi, sudah dibuat suatu aplikasi pengajuan penerbitan SKP yang dinamakan E-SKP. Untuk membuat aplikasi ini pihak Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur tidak membuat sendiri melainkan menyewa jasa perusahaan pengembang situs dan aplikasi berbasis web. Namun masih terdapat kendala di *server* untuk E-SKP karena *server* yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur belum cukup siap sehingga terpaksa menyewa *server* lokal dari



luar Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur.

### Saran

Berbagai temuan yang terungkap dalam penelitian ini menunjukkan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur terkait kesiapan penyelenggaraan pelayanan E-SKP. Berikut ini disarankan beberapa hal sebagai bahan rekomendasi untuk perbaikan:

1. Memberikan fasilitas berupa 1 (satu) atau beberapa unit perangkat komputer yang dapat dipergunakan untuk UPI yang datang ke kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur namun belum mengakses aplikasi E-SKP atau belum mengetahui tentang aplikasi E-SKP.
2. Data dan informasi dalam situs web resmi Dinas Perikanan dan Kelautan dapat lebih sering diperbarui dengan data/berita terkini (*update*). Pihak pengelola aplikasi berbasis web E-SKP diharapkan dapat segera mengintegrasikan situs web E-SKP dengan situs web resmi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur. Serta menugaskan seorang pegawai atau lebih untuk secara khusus mengelola situs web resmi agar fitur Diskusi yang disediakan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
3. Segera menyiapkan *server* dari Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur agar tidak perlu lagi menyewa *server* lokal dari luar. Serta menyediakan komputer *server* di kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur.
4. Perlu disediakan pelatihan intensif bagi pegawai khususnya pegawai seksi Bina Mutu supaya tidak terlalu bergantung dengan CV. Refresh Media Technology, sehingga pegawai seksi Bina Mutu dapat melakukan *maintance* sendiri jika sewaktu-waktu terjadi *error* pada aplikasi E-SKP.
5. Diperlukan kajian dan penelitian yang lebih lanjut terhadap penyelenggaraan E-SKP di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur agar dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi awal.

### DAFTAR PUSTAKA

Andrianto, Nico. (2007). *Good Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui E-Government*. Palangkaraya: Bayu Media

Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta

Cahyadi, Adi. (tanpa tahun). *E-Government: Suatu Tinjauan Konsep dan Permasalahan*. Jurnal (*online*). ([http: http://research-dashboard.binus.ac.id/](http://research-dashboard.binus.ac.id/), diakses 24 Februari 2016)

Draft Master ICT Plan Report V3 UNDP (<http://info.undp.org>, diakses 13 Desember 2015)

Hasibuan, Zainal A, & Santoso, Harry B. (2005). *Standardisasi Aplikasi E-Government Untuk Instansi Pemerintah*. Jurnal (*online*). (<http://e-dokumen.kemenag.go.id/>, diakses 17 Februari 2016)

Indrajit. (2005). *E-government In Action: Ragam Kasus Implementasi Sukses di Berbagai Belahan Dunia*. Yogyakarta: Andi

Indrajit. (2006). *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi*. Yogyakarta: Andi

Instruksi Presiden No.6 tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media, dan Informatika)

Instruksi Presiden RI No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 57/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Lembaga

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 57/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Lembaga

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor. 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Keraf, Gorrys. (2001). *Komposisi*. Flores: Nusa Indah

Mouw, Erland. (2013). *Kualitas Pelayanan Publik di Daerah: Sebuah Kajian Teoritis*. Jurnal (*online*). ([http:// http://journal.uniera.ac.id/](http://journal.uniera.ac.id/), diakses 12 Desember 2015)

Nasution, S. (2002). *Metode Research*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Nawawi, Hadar. (1987). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur

Peraturan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Nomor Per.09/DJ-P2HP/2010 tentang Persyaratan, Tata Cara Penerbitan, Bentuk, dan Format Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 94 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur

Statistik P2HP (Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan) Tahun 2013 Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur

(<http://diskanlut.jatimprov.go.id/>, diakses 30 November 2015)

Subagyo, P. Joko. (2006). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta

Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Widodo, Joko. (2001). *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia

Young, James S. L. (2003). *E-Government in Asia: Enbaling Public Service Innovation in the 21<sup>st</sup> Century*. Singapura: Times Edition

<http://nasional.kompas.com/read/2015/04/14/18293121/.E-government.Indonesia>

<http://seafoodservicecenter.com/?p=3463>

